

TERKENA JALUR KA BANDARA

## Rumah Segera Dikosongkan



KR-Agusutata

Salah satu rumah warga Kaligintung terkena jalur KA bandara.

**TEMON (KR)** - Rumah Khusus (Rusus) di Siwates, Kalurahan Kaligintung dipinjamkan menjadi tempat relokasi sementara bagi warga terdampak pembangunan jalur rel Kereta Api (KA) bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Informasi yang berhasil dihimpun di Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Jumat (4/9) menyebutkan pada pertengahan September 2020, rumah tinggal terkena jalur KA bandara harus dikosongkan.

Pekerjaan pembangunan jalur KA bandara telah sampai pemukiman penduduk di Kaligintung. Warga yang telah menerima ganti rugi siap pindah. Namun rumah yang dipersiapkan untuk pindah di tanah relokasi belum dapat ditempati.

"Warga yang rumahnya terdampak jalur KA bandara mengharapkan pemerintah memberikan jaminan kepastian tanah relokasi agar dapat segera memulai pembangunan rumah untuk pindah," ujar Mukholish Fuat, Ulu-ulu atau Kepala Seksi Pembantuan dan Pemberdayaan Kalurahan Kaligintung, Jumat (4/9).

Dalam rapat koordinasi terakhir, katanya Pemkab hendak memfasilitasi warga terdampak jalur rel KA bandara yang rumahnya harus dikosongkan. Meminjamkan Rusus di Pedukuhan Siwates menjadi tempat pindah sementara sebelum pembangunan rumah di tanah relokasi dapat ditempati. Menurutnya, Pemkab juga membantu akomodasi untuk pindah dan memberikan stimulan biaya hidup selama tinggal sementara di rusus. Lima dari sebanyak 16 KK terdampak jalur rel KA bandara akan menjadi penduduk relokasi rusus.

"Sebanyak 11 KK harus pindah sementara di Rusus sampai rumah di relokasi bisa ditempati. Terbentuk perizinan dari pihak terkait, warga belum dapat memulai pembangunan rumah di relokasi," ujarnya.

Koordinator Pembangunan Rumah Relokasi, Ribut Yuwono mengharapkan pihak berwenang segera mengeluarkan perizinan penggunaan tanah untuk relokasi. Warga siap membangun rumah mandiri yang terkena jalur rel KA bandara. (Ras)-f

HADAPI MASA TANAM III

## Aman, Ketersediaan Pupuk Subsidi

**WATES (KR)** - Pupuk subsidi dijamin oleh Pemkab Kulonprogo ketersediaan amannya dalam menghadapi Masa Tanam III. Alokasi pupuk ini sudah sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RD-KK) pupuk subsidi.

"Hasil pengecekan Kios Pupuk Lengkap (KPL) Garuda Nusantara Sogan, keperluan stok pupuk bulan ini masih aman dan mencukupi kebutuhan Masa Tanam III.

Kalaupun nanti ada kekurangan, kami akan koordinasi dengan kelompok

tani," ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo Ir Muh Aris Nugroho MMA.

Alokasi pupuk Urea di Kulonprogo dalam satu tahun sebanyak 4.421 ton, SP-36 sebanyak 668 ton, ZA sebanyak 1.226 ton, NPK (Phonska) 7.303 ton, organik sebanyak 624 ton.

"Mulai September ini, Kementerian Pertanian memberlakukan sistem pembelian pupuk subsidi dengan kartu tani. Mesin electronic data capture (EDC) sudah siap di kios pupuk lengkap (KPL) dan

kios sudah dilatih penggunaan EDC dari Bank BRI," ujar Aris, Jumat (4/9).

Lebih lanjut Aris menyatakan, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena belum seluruhnya mempunyai kartu tani dan belum mengetahui terkait mulai diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun hal itu akan segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait lainnya untuk kelancaran transaksi pupuk bersubsidi pemerintah dan kebutuhan pupuk petani tidak terganggu. (Wid)-f

TOT PEMILOS DARING

## KPU Beri Pendidikan Pemilih Pemula

**WATES (KR)** - Dalam upaya memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, mengambil media pengawasan terhadap Pemilu Siswa atau Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) di sekolah setingkat SLTA serta Tsanawiyah. Untuk itu KPU menggelar Training of Trainer (ToT) secara Daring melalui zoom ini diikuti sebanyak 300 orang, yang terbagi 5 angkatan.

"Pemilih pemula menjadi salah satu kelompok penting yang menjadi perhatian dalam Pendidikan Pemilih. Bukan saja, karena mereka adalah pemilih yang baru akan berpartisipasi sebagai pemilih pertama kali, tetapi juga karena mereka penerima estafet kepemimpinan di masa depan. Komitmen mereka terhadap demokrasi, adalah juga komitmen terhadap masa depan demokrasi di Indonesia,"

ujar Hidayatut Thoyyibah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kulonprogo, Jumat (4/9).

Di Kulonprogo terdapat 75 sekolah, terdiri 53 sekolah setara SLTA, 7 Aliyah dan 15 Tsanawiyah. Tiap sekolah menyertakan 4 orang meliputi 1 pembimbing OSIS dan 3 calon panitia pemilihan OSIS. Total peserta TOT secara Daring melalui zoom ini sebanyak 300 orang, yang terbagi 5 angkatan. Senin (31/8) SMA dan SMK di Kapanewon Temon, Kokap, Pengasih dan Panjatan. Selasa (1/9) SMA dan SMK di Kapanewon Wates, Rabu (2/9) SMA dan SMK di Kapanewon Galur, Lendah, Sentolo. Kamis (3/9) SMA dan SMK di Kapanewon Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh dan Kalibawang. Serta Jumat (4/9) bagi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. (Wid)-f

## LazisMu Gunungkidul Bedah Rumah

**WONOSARI (KR)** - Membantu memberikan tempat tinggal yang lebih layak, LazisMu Gunungkidul melaksanakan bedah rumah dhuafa Fajar Sidik Kurniawan di Munggur, Ngeposari, Semanu. Bersama HM Subardi tokoh masyarakat setempat, Ny Sri Sulastri, Kepala MI Muh Munggur Semanu,

LazisMu menyambangi rumah mas Fajar, kondisi rumah sangat memprihatinkan karena ber dinding anyaman bambu. "Melihat kondisi tersebut, LazisMu bersama donatur membangun rumah layak huni," kata Ketua LazisMu Gunungkidul Wahyudiyono MPdI, Jumat (4/9).

Peletakan batu pertama

pembangunan bedah rumah dilakukan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gunungkidul Drs H Sadmonodadi MA. Sedangkan untuk penanggungjawab bedah rumah dipimpin Slamet Triyono. Diungkapkan, dari donasi warga Muhammadiyah lain terkumpul dana Rp 28.350.000. Pembangunan bedah rumah ini sudah dimulai dan harapannya nanti dapat segera terselesaikan dan menjadi tempat tinggal lebih layak bagi keluarga Fajar. Penerima bantuan bedah rumah ini merupakan tulang punggung keluarga. Harus menghidupi 6 anggota keluarganya. "Kepada para donatur yang telah memberikan bantuan disampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan," imbuh-



KR-Dedy EW

Peletakan batu pertama pelaksanaan bedah rumah.

(Ded)-f

ARIF SETIADI KETUA TIM PEMENANGAN

## 4 Parpol Koalisi Deklarasi Usung Sutrisna-Ardi

**WONOSARI (KR)** - Empat parpol koalisi masing-masing PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra mendeklarasikan diri mengusung pasangan calon bupati Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd dan wakil bupati Mahmud Ardi Widanto SIP di kompleks Lembah Ngingrong, Wonosari, Jumat (4/9) sore. Bersamaan juga dikukuhkan tim pemenang dengan diketuai oleh Arif Setiadi yang juga Ketua DPD PAN Gunungkidul.

"Kami bertekad mewujudkan Gunungkidul Maju dan Berbudaya di Abad Samudera Hindia. Gunungkidul tanggap, Sehat, Cerdas, Kreatif dan Harmoni," kata Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd didampingi Mahmud Ardi Widanto dalam orasi politiknya.

Deklarasi ini dihadiri Pengurus DPP PAN Totok Daryanto, Ketua DPD PKS Ari Siswanto, Ketua DPC Demokrat Supriyani Astuti, Ketua DPD Gerindra Purwanto, tokoh parpol koalisi dan masyarakat. Kegiatan juga dihibur pertunjukan campursari bersama Dimas Tedjo. Diungkapkan, membangun Gunungkidul butuh sinergi. Perlu dibangun kawasan ekonomi baru dengan JJLS dan Bandara Internasional Yogyakarta di wilayah sela-

tan, penciptaan lapangan kerja berbasis keterampilan vokasional." Mengutamakan kemajuan dibidang pendidikan, peningkatan sarana prasarana, ekonomi berbasis

lokalitas, kreatifitas, strategi dan tangguh," ujarnya.

Pengurus DPP PAN Totok Daryanto berharap, parpol koalisi bekerja untuk memenangkan pasangan Sutrisna-Ardi. Ketika nantinya mampu menang dan memimpin Gunungkidul, tentu harus bekerja secara maksimal untuk membangun daerah. Kemenangan Sutrisna-Ardi juga menjadi kemenangan rakyat. "Mencermati berbagai program yang telah disampaikan, pasangan Sutrisna-Ardi memang yang dibu-

tuhan untuk membangun Gunungkidul menjadi lebih baik," jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (3/9) malam DPP Partai Gerindra serahkan SK dukungan kepada pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Prof Sutrisna Wibawa MPd - Mahmud Ardi Widanto SIP di Joglo Sanggar Kegiatan Masyarakat, Sokoliman, Bejiharjo. Bersamaan itu digelar pertunjukan wayang kulit 'Semar Mbangun Kanyangan' dengan dalang Ki Kwat Hadi Samono, pengajian dan doa bersama. (Ded)-f



KR-Dedy EW

Prof Dr Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto SIP menerima SK deklarasi 4 parpol maju Pilkada.

PROGRAM E-TECKETING OBWIS

## Disorot Kalangan Dewan, Molor dari Rencana

**WONOSARI (KR)** - Wacana Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memberlakukan e-ticketing di sejumlah objek wisata pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum terealisasi mendapat kritikan dari DPRD Kabupaten Gunungkidul, Jumat (4/9). Wakil DPRD Hery Nugroho SS menyatakan program tersebut seharusnya bisa dilaksanakan. Pasalnya dengan memberlakukan e-ticketing akan mencegah terjadinya kebocoran dan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah.

"Penerapan skema dari program ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata secara signifikan," katanya.

Saat ini untuk penerapan program tersebut di Gunungkidul harus terus upayakan dan koordinasi antara pemerintah dan DPRD yang membidangi pariwisata harus secepatnya dilaksanakan untuk melakukan pembahasan mengenai program e-ticketing ini agar secepatnya bisa dieksekusi.

Adapun dengan e-ticketing ini disebut Hery Nugroho optimis dapat menekan kebocoran pendapatan sektor pariwisata. Selama ini, potensi kebocoran pendapatan untuk pemungutan retribusi itu memang ada.

"Sistem yang diterapkan saat ini masih manual, dibuka 24 jam dan tanpa pengawasan yang ketat dan di situlah potensi kebocoran dapat terjadi," ujarnya.

Terpisah Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Harry Sukmono menyatakan, sampai dengan saat ini, program penerapan e-ticketing di kawasan wisata tersebut memang masih berproses. Program tersebut belum bisa diterapkan karena adanya sejumlah kendala termasuk perlunya ada payung hukum hingga persiapan infrastruktur penunjang penerapan program e-ticketing dapat berjalan sesuai harapan.

Selain itu jaringan internet di kawasan wisata juga menjadi salah satu kendala. Mengingat di kawasan pesisir, cukup sulit untuk mendapatkan sinyal. Namun

demikian, pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan lainnya dalam penyediaan internet. "Saat ini masih terus berproses dan berharap nantinya bisa dilaksanakan," ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan, permasalahan yang dihadapi terkait penerapan program e-ticketing adalah berkaitan dengan pasokan listrik.

Pemadaman listrik yang sering terjadi dapat berpengaruh terhadap layanan di TPR, perlu adanya penanganannya dan antisipasi khusus agar tidak terjadi pemadaman listrik.

Menurut dia, program internet gratis yang digagas oleh Pemkab Gunungkidul yang tersebar di sejumlah titik umum dan objek wisata diharapkan mampu menjadi solusi terkait permasalahan jaringan internet di Gunungkidul. "Dengan begitu program pemerintah dengan penerapan e-ticketing dapat segera terealisasi," terangnya. (Bmp)-f

BUPATI MINTA PETUGAS LAPANGAN

## Jangan Sungkan Mengkritik Pemerintah



KR-Asrul Sani

Bupati Sutedjo dan Cahyadi Anjar Nugroho (tengah) di Pemkab Kulonprogo.

**WATES (KR)** - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY bersama Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo membahas tentang tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan Covid-19. Baik mengenai penyusunan regulasi maupun monitoring evaluasi fungsi dan koordinasi.

Selain itu tim BPK RI yang ditugaskan di DIY dipimpin Ketuanya, Cahyadi Anjar Nugroho di Kom-

pleks Pemkab setempat, Jumat (4/9).

Bupati Sutedjo menegaskan aparaturnya negara atau pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di masyarakat hendaknya tidak sungkan memberitahu kelemahan maupun kekurangan Pemerintah Kulonprogo dalam penanganan Covid-19.

"Wabah virus Corona belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga baru sekarang kita melakukan

kegiatan aktivitas serta kebijakan baru," ujarnya.

Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Fajar Gegana menjelaskan, penanganan Covid-19 lebih mengacu ke Pemda DIY dan pemerintah pusat. Dilihat dari anggaran per-Kabupaten masih harus mengajukan penawaran sehingga akan membutuhkan waktu meminta pendampingan dari kejaksaan dan yang lainnya.

"Harapannya dengan adanya tim dari BPK RI maka penanganan kasus Covid-19 di Kulonprogo bisa terselesaikan dengan baik," tegasnya.

Pemkab Kulonprogo tidak akan mengambil kebijakan yang tidak sesuai kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya. Kendati demikian dalam implementasinya jika terjadi bias dalam memproyeksikan kebijakan lapangan yang tidak sesuai regulasi, silahkan melapor agar bisa di tindaklanjuti kemudian dilakukan penyempurnaan dalam menjalankan tugas penanganan Covid-19 ke depannya.

(Rul)-f